

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
GLOSARIUM	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
1. Rumusan Masalah	8
2. Pertanyaan Penelitian.....	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
E. Urgensi dan Kebaruan Penelitian	10
1. Urgensi.....	10
2. Kebaruan	10
F. Teorisasi	11
1. Penelitian Terdahulu	11
2. Landasan Teori	19
3. Konseptualisasi.....	37
4. Definisi Operasional	50
5. Asumsi Penelitian	52
G. Metode Penelitian.....	53
1. Pendekatan	53
2. Metode	54

3. Narasumber	57
4. Teknik Pengumpulan Data	58
5. Teknik Analisis Data	60
H. Limitasi Penelitian.....	60
I. Sistematika Penyajian	60
BAB II KOMUNIKASI PUBLIK SEBAGAI SISTEM <i>AUTOPOIESIS</i>	63
A. Konsep <i>Autopoiesis</i> dalam Kajian Ilmu Sosial.....	63
B. Perkembangan Kajian Komunikasi Publik.....	73
1. Komunikasi Publik Sebagai Penguatan Pesan Publik	75
2. Komunikasi Publik sebagai Tindakan Keberpihakan pada Isu Publik ...	79
3. Komunikasi Publik sebagai Sistem Refleksi Makna Publik	84
C. <i>Autopoiesis</i> Komunikasi Publik Pemerintah Daerah di Era Digital	99
1. Dimensi Sosial Komunikasi Publik	100
2. Dimensi Temporal Komunikasi Publik	106
3. Perkembangan Fungsi Komunikasi Publik	107
BAB III DIVISI KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH	113
A. Organisasi Komunikasi Publik Pemerintah Jawa Tengah.....	113
1. Wilayah Administratif Provinsi Jawa Tengah	113
2. Organisasi Komunikasi Publik Pemprov Jawa Tengah.....	116
B. Pemerintah Daerah Dalam Konsep Negara Kesatuan.....	128
1. Demokrasi sebelum era Soeharto	129
2. Demokrasi era Soeharto	135
3. Demokrasi era Pasca Soeharto	137
BAB IV PEMAKNAAN KOMUNIKASI PUBLIK OLEH PEMPROV JAWA TENGAH DI ERA DIGITAL	152
A. Pemaknaan Era Digital	153
1. Pergeseran Saluran Komunikasi Publik.....	153
2. Era Kebebasan Berpendapat	159
3. Persaingan Terbuka dengan Pemerintah Daerah Lainnya	161
4. Tren Pengukuran Kuantitatif pada Capaian Kinerja Komunikasi Publik 164	
5. Percepatan Respons Pelayanan Publik	167
6. Jejak Digital	169

7. Kinerja Komunikasi Publik Mengikuti Perkembangan <i>Platform</i> Media Digital	171
8. Kerentanan Informasi	177
9. Tingginya Anggaran Komunikasi Publik Era Digital	182
10. Bertambahnya Kebutuhan SDM Pengelola Komunikasi Digital	184
11. Membudayakan “ <i>E-Blusukan</i> ” dan “Merecehkan” Politik	185
12. Membangun Dialog dan Responsif.....	187
13. Komunikasi Berbasis Ekspektasi Publik.....	193
14. Tuntutan Kreativitas dan Inovasi	196
B. Pengungkapan Komunikasi Publik melalui Media Digital	197
1. Komunikasi Publik Tahun 2018.....	198
2. Komunikasi Publik Tahun 2019.....	203
3. Komunikasi Publik Tahun 2020.....	210
4. Komunikasi Publik Tahun 2021.....	217
5. Komunikasi Publik Tahun 2022.....	222
C. Rangkuman Pemaknaan Komunikasi Publik Pemprov Jawa Tengah di Era Digital.....	228
BAB V PENGEMBANGAN TATA KELOLA KOMUNIKASI PUBLIK PEMPROV JAWA TENGAH DI ERA DIGITAL	233
A. Perubahan Kebijakan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah.....	234
1. Perubahan Kebijakan Pemerintah Pusat 2018-2022.....	235
2. Perubahan Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.....	243
B. Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	260
1. Perubahan Divisi dalam Struktur dan Pola Koordinasi	261
2. Perubahan Kebutuhan Kapasitas Internal	265
C. Rangkuman Pengembangan Tata Kelola Komunikasi Publik Pemprov Jawa Tengah di Era Digital	270
BAB VI AUTOPOIESIS KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH PEMPROV JAWA TENGAH DI ERA DIGITAL 2018-2022.....	275
A. Lingkungan Komunikasi Era Digital	276
B. Komunikasi (Dimensi Sosial): Refleksi Tertutup (<i>Blind Reflexivity</i>) Sistem Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	281
1. Determinasi Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	287
2. Pemaknaan Baru Reputasi, Pemaknaan Lama pada Respons	290
3. Refleksi Kepublikan Terbatas Pada Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Publik	295

C. Evolusi (Dimensi Temporal): Tiga Fase Pengembangan Tata Kelola.....	298
1. Fase 1 (2018): Digitalisasi Saluran Kritik dan Diseminasi Kinerja	300
2. Fase 2 (2019-2021): Peningkatan Ekspos Publikasi Kinerja	302
3. Fase 3 (2022): Perluasan Jangkauan Publikasi Kinerja	305
D. Diferensiasi (Dimensi Fungsional): Penyusutan dan Alopoiesis Sistem Kepublikan.....	307
1. Ketidakpastian Visi Digitalisasi	308
2. Dependensi Sistem pada Aktor	311
3. Stagnasi Pengembangan Tata Kelola.....	314
4. Surplus Reputasi, Defisit Kepublikan.....	315
E. Hambatan <i>Autopoiesis</i> Sistem Komunikasi Publik Pemerintah Daerah di Era Digital.....	317
BAB VII PENUTUP.....	321
A. Simpulan.....	321
B. Implikasi Penelitian.....	326
1. Implikasi Akademis	326
2. Implikasi Praktis	327
C. Rekomendasi.....	327
D. <i>Postscript</i> : Potret Terkini Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	328
DAFTAR PUSTAKA	330
LAMPIRAN	365